



KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL



Kebijakan Pemerataan dan Keadilan Pelaku Ekonomi Dengan Memperkuat Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian

**Dr. Arif Budimanta
Wakil Ketua KEIN**

Makassar, 14 Juli 2017



“ Negeri belumlah makmur dan belum menjalankan keadilan sosial, apabila fakir miskin masih berkeliaran di tengah jalan dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang, terlantar hidupnya

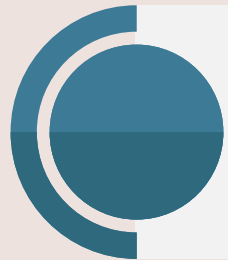
Ekonomi Terpimpin, Mohammad Hatta (1979)

”



KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Kesejahteraan Umum adalah Tujuan Republik Indonesia Didirikan



Sila ke-5 Pancasila berbunyi :
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan membentuk Negara Indonesia adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur



Pasal 33 UUD 1945 menekankan politik perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat:

- Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- Ayat 4 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional



Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa koperasi merupakan bangun perusahaan yang sesuai bagi dasar demokrasi ekonomi Indonesia



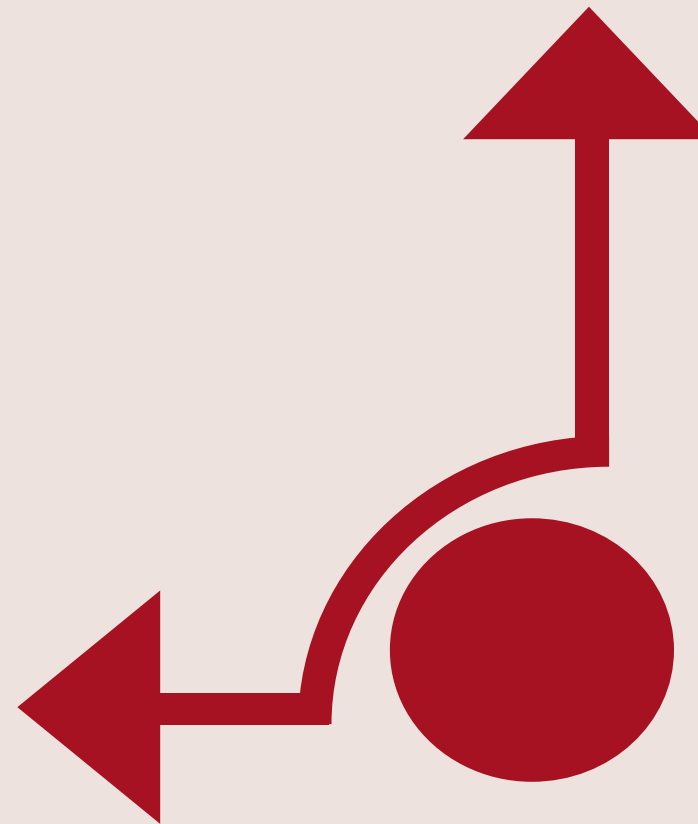
KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Koperasi selalu ada dalam nomenklatur pemerintahan Republik Indonesia dan sejak 23 April 1983 koperasi ditetapkan menjadi departemen tersendiri.

Koperasi Mendapat Sokongan yang Kuat dari Pemerintah Sejak Indonesia Merdeka

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkoperasian di Indonesia melalui penerbitan:

- UU no 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian
- UU no 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian





KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Kontribusi koperasi belum optimal dalam mendorong perekonomian

| Indikator | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|--------|--------|---------|---------|
| Total Koperasi Aktif (Unit) | 88 930 | 94 818 | 124 855 | 150 223 |
| Rasio Jumlah Anggota Koperasi terhadap Penduduk Usia Dewasa (%) | 19.33 | 17.22 | 17.70 | 20.30 |
| Rasio Volume usaha Terhadap PDB (%) | 1.58 | 1.40 | 1.12 | 2.31 |

Sumber : BPS dan Kemenkop (diolah)



Dari sisi jumlah, total koperasi yang aktif di Indonesia terus mengalami kenaikan. Selain itu, persentase penduduk usia dewasa yang menjadi anggota koperasi terus meningkat. Namun demikian, kontribusi aktivitas koperasi terhadap perekonomian ekonomi Indonesia belum optimal, dan pada tahun 2015 total volume usaha koperasi hanya menyumbang sekitar 2% terhadap nilai PDB



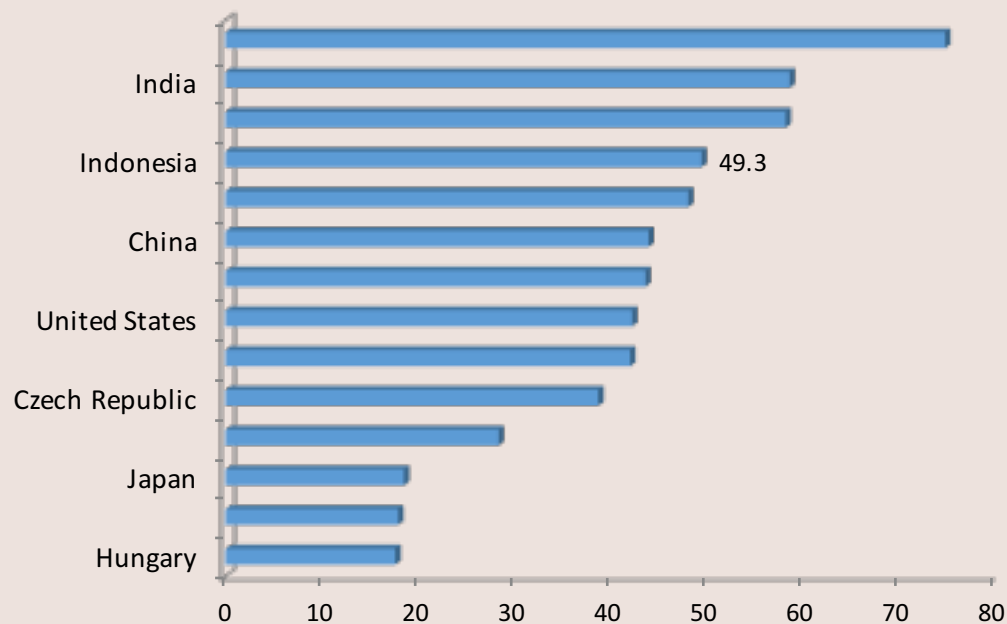


KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Perekonomian Indonesia dikuasai segelintir elit

Laporan *Credit Suisse* tahun 2016 menyatakan bahwa 1% penduduk terkaya Indonesia menguasai 49.3% kekayaan nasional, dan 10% penduduk terkaya menguasai 75.7% kekayaan nasional

Proporsi total kekayaan yang dikuasai 1 persen rumah tangga terkaya (persen)



Sumber : Global Wealth Databook, *Credit Suisse* (2016)

| Kategori Nominal Simpanan (Rupiah) | Rekening | | Nominal | |
|------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|
| | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen |
| N ≤ 100 Jt | 202,646,710 | 97.95 | 691,650 | 13.80 |
| 100 Jt < N ≤ 2 M | 3,999,498 | 1.93 | 1,434,224 | 28.61 |
| N > 2 M | 239,215 | 0.12 | 2,887,814 | 57.60 |

Sumber : Laporan Distribusi Simpanan Bank Umum, LPS April 2016

Data LPS April 2017 menunjukkan bahwa 57,6% total simpanan yang ada di perbankan Indonesia, dikuasai oleh sekitar 0.12% masyarakat terkaya Indonesia



KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, 44 grup konglomerasi keuangan menguasai **66,2%** total aset sistem jasa keuangan (SJK) dan **84,7%** aset perbankan di Indonesia.



| | 102 KK (Homogen dan Lintas Sektor) | 44 KK (Lintas Sektor) - DPTI |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Total Aset | 6.247,7 T | 5.478,8 T |
| % terhadap Total Aset Perbankan | 96,57% | 84,70% |
| % terhadap Total Aset SJK | 75,48% | 66,20% |

Sumber: Laporan OJK Triwulan IV 2016



“Menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian merupakan cita-cita nasional untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi hal itu belum dapat terwujud dikarenakan masih terdapat permasalahan-permasalahan koperasi di Indonesia”

Keterlambatan Koperasi dalam Mengadopsi IT

- Koperasi di Indonesia terlambat dalam mengadopsi IT baik dalam manajemen maupun pelayanan

Kurangnya Pengawasan Koperasi

- Pemerintah membantu koperasi lewat dana segar yang tidak perlu dikembalikan tanpa adanya pengawasan terhadap dana tersebut

Kurangnya Partisipasi Anggota

- Menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap pengurus koperasi dan akhirnya rentan terhadap penyelewengan

1

2

3

4

5

6

Regulasi dan koordinasi

- Kebijakan antar kementerian perlu sinkronisasi
- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah tidak sinkron
 - Contoh perizinan pembukaan cabang

Intervensi dan sokongan pemerintah yang tidak konsisten

- Nilai anggaran cenderung menurun sejak 5 tahun terakhir
- KUR bersifat kontra produktif terhadap pengembangan koperasi
- Koperasi tidak berkembang karena dipengaruhi kebijakan-kebijakan yang “non-ekonomis”

SDM yang Kurang Memadai

- Tingkat Pendidikan pengurus yang rendah.
- Pengelola seringkali diambil dari pihak-pihak yang belum pengalaman baik dari segi akademis maupun wirausahanya



KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Nilai anggaran Kementerian Koperasi dan UKM cenderung menurun sejak 5 tahun terakhir

(dalam miliar rupiah)



Sumber: LKPP dan Nota Keuangan

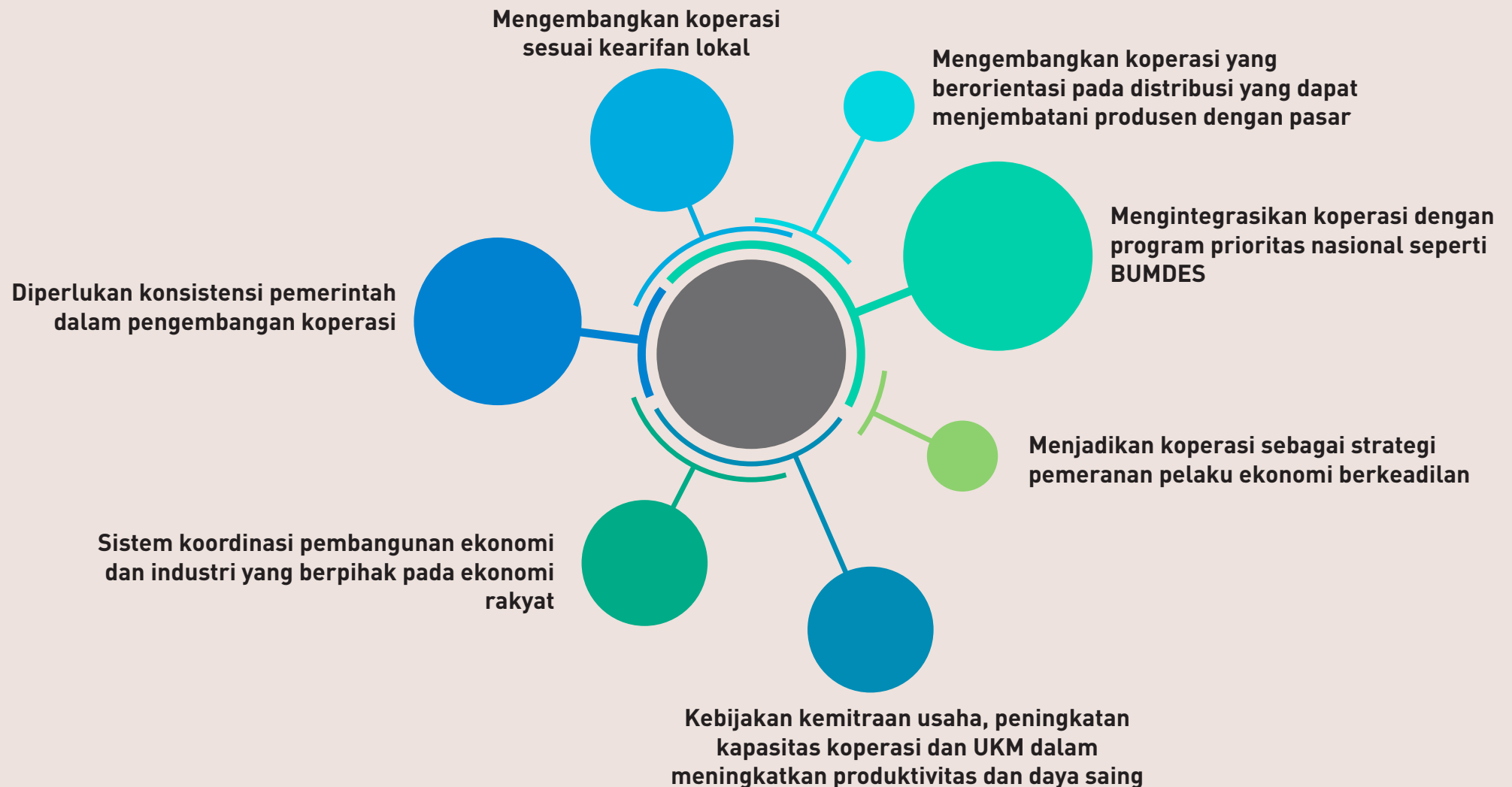


KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

“

Upaya menjadikan Koperasi sebagai bangun perusahaan yang menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia dalam rangka mewujudkan perekonomian yang merata dan berkeadilan

”



Terima Kasih



Dr. Arif Budimanta

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional
Republik Indonesia

Arif Budimanta menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Indonesia, kemudian studi mengenai keuangan di University of Chicago serta mengikuti Senior Executive Programme di Harvard Business School (HBS) – Harvard University.

Saat ini, Arif Budimanta juga menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank dan di sela-sela kesibukannya, ia juga aktif sebagai pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Arif juga merupakan pendiri dan penasihat senior bagi Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD) dan di samping itu menjadi anggota dari Royal Economic Society (RES) London.

Pada Periode 2009-2014, Arif Budimanta terpilih sebagai Anggota DPR RI dan ditugaskan pada Komisi XI yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Keuangan dan Perbankan.